

Diplomasi Konferensi Indonesia Terkait Konflik Etnis Rohingnya di Myanmar

Cheryl Natasha¹, M. Daffi Fauzan W.², Georgiana Rhea H.³, Patricia Mutiara Tresna Putri⁴, Ivana Lulu⁵, Edina Yasmeeen P.⁶

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901001@student.unpar.ac.id

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901105@student.unpar.ac.id

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901148@student.unpar.ac.id

⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901170@student.unpar.ac.id

⁵ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901189@student.unpar.ac.id

⁶ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, 6091901242@student.unpar.ac.id

Abstract

Conference diplomacy is a way for Indonesia to realize its country's interests and participate in international conflict resolution. In the 35th ASEAN Summit, Indonesia articulated its intention to contribute in the resolution of the Rohingya conflict. Indonesia's actions are explained using the theories of conference diplomacy proposed by A.J.R Groom. In addition, Indonesia's conference diplomacy related to the Rohingya ethnic conflict also has its own strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The similarity of Muslim population, Indonesia's identity in the international system, and the supports from domestic community have become its own strengths. But, limited funds accompanied by domestic economic instability, and Indonesia's indecisive attitude became Indonesia's weaknesses. Indonesia's conference diplomacy received a lot of support from NGOs, financial aid foundations, and ASEAN member countries. But Myanmar rejects Indonesia's attitude which is considered too meddling. These dynamics have made Indonesia's conference diplomacy in the era of President Joko Widodo's leadership regarding the Rohingya ethnicity in Myanmar not yet fully successful.

Keywords: *Conference diplomacy, Rohingya, Indonesia, SWOT Analysis*

Abstrak

Diplomasi konferensi menjadi cara Indonesia mewujudkan kepentingan negaranya dan berpartisipasi dalam resolusi konflik internasional. Dalam KTT ASEAN ke-35, Indonesia mengartikulasikan niatnya untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik Rohingya. Tindakan Indonesia tersebut dijelaskan menggunakan teori diplomasi konferensi yang dikemukakan oleh A.J.R Groom. Selain itu, diplomasi konferensi Indonesia terkait konflik Rohingya juga memiliki kekuatan, kelemahan, peluang, hingga ancamannya tersendiri. Kesamaan mayoritas penduduk Muslim, identitas Indonesia dalam sistem internasional, hingga dukungan masyarakat domestik menjadi kekuatan bagi Indonesia. Namun, keterbatasan dana disertai instabilitas ekonomi dalam negeri, dan sikap Indonesia yang tidak tegas menjadi kelemahan Indonesia. Indonesia mendapatkan banyak dukungan dari pihak eksternal seperti, NGO, yayasan bantuan dana, dan negara anggota ASEAN. Namun di satu sisi, Myanmar justru menolak sikap Indonesia yang dinilai terlalu ikut campur. Dinamika tersebut membuat diplomasi konferensi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait etnis Rohingya di Myanmar belum sepenuhnya berhasil.

Kata Kunci: *Diplomasi konferensi, Rohingya, Indonesia, Analisis SWOT*

Pendahuluan

Hubungan antar negara menimbulkan kondisi saling dipengaruhi dan mempengaruhi satu sama lain. Fakta tersebut memicu negara-negara untuk melakukan kerjasama, negosiasi, hingga diplomasi dengan berbagai tujuan serta kepentingan nasionalnya. Perwujudan negosiasi demi menemukan konsensus atas sebuah isu dapat direalisasikan melalui konferensi antar negara yang bersifat non-rutin dan dihadiri oleh negara yang berkepentingan sesuai dengan argumen Peter Willetts.¹ Selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia turut aktif dalam menghadiri konferensi-konferensi demi menyampaikan suaranya atas berbagai isu internasional. Salah satunya adalah keaktifan Indonesia untuk berpartisipasi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang membahas permasalahan kerjasama, konflik, pemberdayaan, hingga resolusi atas konflik negara-negara khususnya di kawasan Asia Tenggara. Salah satu isu yang sempat mendapat perhatian Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN adalah isu kekerasan serta diskriminasi terhadap etnis minoritas Rohingnya di Myanmar.

Secara umum, diplomasi yang dilakukan suatu negara dengan mengirimkan perwakilannya bertujuan untuk menyampaikan cara pandang, bernegosiasi, serta aktivitas terkait lainnya melalui pembicaraan tidak resmi dan korespondensi.² Sementara itu, diplomasi Indonesia dalam KTT ASEAN yang membahas kasus kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingnya bertujuan untuk melindungi keselamatan etnis minoritas tersebut. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, melalui Presiden Joko Widodo, Indonesia bertujuan untuk menghentikan kasus kekerasan kemanusiaan di Myanmar serta mewujudkan perdamaian baik bagi Myanmar, regional, hingga perdamaian dunia sesuai dengan pilar perjuangan hak asasi manusia oleh ASEAN.³ Alasan Indonesia menghadiri konferensi tersebut adalah adanya rasa solidaritas kemanusiaan yang menjadikan Indonesia dengan politik luar negeri bebas-aktifnya berkomitmen untuk menjalankan mekanisme *Responsible to Protect* (R2P) khususnya terkait pencegahan genosida, kejahatan kemanusiaan, hingga kejahatan perang.⁴ Di samping itu, Indonesia juga menilai bahwa diskriminasi terhadap etnis Rohingnya telah melewati batas sehingga perlu mendapatkan perhatian internasional dalam upaya merumuskan resolusi konfliknya. Sehingga, penulis bertujuan untuk menganalisis keterkaitan diplomasi konferensi Indonesia dengan kerangka teori serta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancamannya.

Metodologi dan Teori

Esai ini ditulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui referensi jurnal, berita, dan buku. Penulis menggunakan buku dari A.J.R Groom yang berjudul "*Conference Diplomacy*" sebagai sumber utama terkait kerangka teori diplomasi konferensi serta indikator pembentuknya. Dengan demikian, kerangka pemikiran dari teori diplomasi konferensi dapat dijelaskan sebagai berikut:

Diplomasi merupakan bagian dari pengelolaan hubungan internasional dalam bentuk negosiasi untuk menyampaikan ide-ide atau bujukan terkait kepentingan nasional tertentu. Sedangkan,

¹ A.J.R. Groom. *Conference Diplomacy*. Dalam Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur (Eds.), *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (pp. 3). United Kingdom: Oxford University Press. 2013

² R.P Bartson, *Modern Diplomacy* (pp. 1). New York: Longman. 1997

³ "Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar 'Hentikan Dan Cegah Kekerasan'," BBC News Indonesia (BBC), diakses 21 Mei, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>

⁴ "KontraS," KontraS, 27 November, 2017, <https://kontras.org/2017/11/27/ktt-asean-gagal-menjawab-krisis-rohingya-pemerintah-indonesia-harus-menjadi-pionir-dalam-mendorong-akuntabilitas-ham-dalam-krisis-rohingya/>.

istilah 'konferensi' dipahami secara umum sebagai pertemuan yang dihadiri para pemimpin negara atau menteri utamanya, diwarnai dengan aktivitas negosiasi, dan biasanya menghasilkan rekomendasi kebijakan atau perjanjian tertentu. Berdasarkan definisi dari dua istilah ini serta mempertimbangkan perkembangan elemen-elemen dalam praktek diplomasi dan konferensi, maka diplomasi konferensi dapat dipahami sebagai bagian dari manajemen atau pengelolaan hubungan antara pemerintah, organisasi antar pemerintah, juga organisasi non-pemerintah, yang berlangsung dalam sebuah konferensi internasional.⁵

Diplomasi konferensi merupakan salah satu bentuk praktik diplomasi yang berkembang pesat pada abad ke-19. A.J.R. Groom dalam tulisannya "*Conference Diplomacy*" menjelaskan beberapa indikator yang mempengaruhi perkembangan praktik diplomasi ini. **Pertama**, kebutuhan akan aturan internasional mengenai persaingan para *great powers* dimana diplomasi konferensi menjadi sarana negosiasi untuk memutuskan aturan main yang harus dipatuhi para *great powers* terkait tindakannya dalam sistem internasional. **Kedua**, pengaruh globalisasi serta isu-isu global yang mengiringinya dimana diplomasi konferensi menjadi sarana diskusi multi aktor terkait isu-isu global yang menuntut penyelesaian secara multilateral, seperti pelestarian lingkungan, keamanan internasional, perlindungan hak asasi manusia, wanita dan anak, mobilisasi manusia, dan lainnya.

Ketiga, terkait dengan perkembangan elemen aktor dalam praktik diplomasi yang kini melampaui negara-negara anggota sistem PBB serta menjadi arena diskusi terbuka antara negara, IGOs, NGOs, kelompok masyarakat sipil, bahkan individu. **Keempat**, legitimasi yang dimiliki lembaga atau organisasi internasional atas anggota-anggotanya untuk berdiplomasi dalam bentuk konferensi. **Kelima**, hasil dari diplomasi konferensi dapat menjadi perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, atau rekomendasi bagi kebijakan domestik suatu negara.⁶ Inilah beberapa indikator yang mempengaruhi pesatnya perkembangan praktik diplomasi dalam bentuk konferensi dari abad 19 dan terus berkembang hingga saat ini.

Analisis

a. Penjelasan Aktivitas Diplomasi

Permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya berujung pada kekerasan hingga kesenjangan sosial yang menarik perhatian internasional dalam upaya penyelesaiannya. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia bersama dengan negara anggota lainnya berupaya untuk memperjuangkan perlindungan serta bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingya yang tidak diakui Myanmar. Untuk merespon isu tersebut, Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan tertinggi Indonesia menghadiri KTT ASEAN ke-35 yang diadakan di Bangkok pada tanggal 2-4 November 2019 dengan tema '*Advancing Partnership for Sustainability*'.⁷

Dalam konferensi tersebut, terdapat beberapa fokus isu yang dibahas, salah satunya adalah isu politik dan keamanan yaitu, kasus etnis Rohingya yang terusir dari negara bagian Rakhine (Myanmar)

⁵ Johan Kaufmann. *Conference Diplomacy: An Introductory Analysis*: edisi ketiga (pp.7-16). London: MACMILLAN PRESS LTD. 1996

⁶ A.J.R. Groom. *Conference Diplomacy*. Dalam Andrew F. Cooper, Jorge Heine, and Ramesh Thakur (Eds.), *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy* (pp. 228-237). United Kingdom: Oxford University Press. 2013

⁷ "Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bangkok, Merangkap UNESCAP Kerajaan Thailand," Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 22 Mei, 2021, <https://kemlu.go.id/bangkok/id/news/2944/presiden-joko-widodo-hadiri-ktt-asean-ke-35-di-bangkok>.

dan mengungsi ke Bangladesh.⁸ Dalam konferensi ASEAN tersebut, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Indonesia siap berperan aktif menyelesaikan kasus Rohingnya. Indonesia bertekad untuk terus melakukan lobi kepada pihak Myanmar agar kekerasan etnis tidak terulang kembali.

Permasalahan etnis Rohingnya di Myanmar dianggap sebagai pelanggaran hak dasar manusia, ancaman keselamatan bagi etnis tertentu, hingga upaya genosida. Untuk mewujudkan tujuan perlindungan hak-hak kemanusiaan tersebut, pihak Indonesia bersama dengan pemimpin negara anggota ASEAN lainnya sepakat untuk membentuk satuan gugus tugas *ad-hoc* yang bertugas untuk mengawal dan melindungi proses repatriasi etnis Rohingnya dari Cox's Bazar (Bangladesh) ke Myanmar. Dimana, gugus tugas tersebut berisikan para ahli yang ditentukan Sekretaris Jenderal ASEAN.⁹ Dalam upaya berdiplomasi dan bernegosiasi terkait konflik kemanusiaan etnis Rohingnya tersebut, ada beberapa pihak yang terlibat dalam konferensi yaitu, Presiden Joko Widodo, Ibu Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, Perwakilan Sekjen PBB, serta para pemimpin negara-negara anggota ASEAN. Namun, tidak seluruh pimpinan negara anggota ASEAN secara tersurat berniat membantu etnis Rohingnya, sebagian besar anggota memilih untuk tidak terlalu ikut campur dan mengambil resiko.

Berdasarkan pernyataan Presiden Joko Widodo, Indonesia siap untuk berperan aktif dalam upaya repatriasi etnis Rohingnya secara aman, sukarela, dan bermartabat. Usulan diplomatis yang dinyatakan Presiden Joko Widodo tersebut mendapatkan respon yang positif dan persetujuan dari negara anggota ASEAN lainnya. Sasaran utama kegiatan diplomasi konferensi tersebut adalah untuk berdialog dengan perwakilan pengungsi yang berada di Cox's Bazar. Dialog dan komunikasi tersebut bertujuan untuk membangun kepercayaan di kalangan pengungsi akan bantuan kemanusiaan yang hendak diberikan Indonesia serta negara anggota ASEAN lainnya. Sasaran berikutnya sesuai dengan perkataan Retno Marsudi, Indonesia akan terus melaksanakan tugas *ad-hoc* bersama dengan negara ASEAN demi memantau pelaksanaan tim *Preliminary Needs Assessment* (PNA). Selain itu, melalui konferensi ini pihak Indonesia juga menetapkan pimpinan Myanmar sebagai sasaran agar menyepakati rangkaian perwujudan proyek dan implementasi rekomendasi PNA demi terlaksananya proses penyaluran bantuan kemanusiaan.¹⁰

Diplomasi konferensi ini bertujuan untuk membentuk satuan kerjasama penyelesaian konflik Rohingnya di Myanmar sebagai bentuk solidaritas organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Di samping itu, diplomasi yang dilakukan Indonesia juga bertujuan untuk menegaskan pernyataan bahwa Indonesia siap membantu mencapai resolusi konflik Myanmar dan berkontribusi dalam bantuan kemanusiaan. Dimana, bantuan-bantuan tersebut pada akhirnya terwujud dalam usulan Indonesia bagi tim tanggap darurat dan penilaian ASEAN (ASEAN-Erat) serta *ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance/AHA Center* untuk melaksanakan kunjungan ke Rakhine State demi melakukan peninjauan kesiapan repatriasi etnis Rohingnya dengan beberapa indikator yakni,

⁸ Lisbet. Isu Strategis dalam KTT ke-35 ASEAN dan Posisi Indonesia. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis 11*, No. 21, 9. 2019. doi: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-21-I-P3DI-Desember-2019-238.pdf

⁹ "ASEAN Akan Bentuk Gugus Tugas Ad Hoc Kawal Repatriasi Rohingnya," Anadolu Ajansı, diakses 22 Mei, 2021, <https://www.aa.com.tr/id/regional/asean-akan-bentuk-gugus-tugas-ad-hoc-kawal-repatriasi-rohingya/1634042>

¹⁰ "Presiden Jokowi Sampaikan Pandangan Bagi Pemulihan Situasi Di Rakhine State: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," Presiden Jokowi Sampaikan Pandangan Bagi Pemulihan Situasi Di Rakhine State | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 22 Mei, 2021, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/749/view/presiden-jokowi-sampaikan-pandangan-bagi-pemulihan-situasi-di-rakhine-state>

keselamatan fisik, pendaftaran Rohingnya, keamanan material, juga penyatuan sosial agar konflik etnis tidak terulang kembali.¹¹

Melalui konferensi tersebut, Indonesia juga bertujuan untuk menyampaikan rancangan kontribusinya terkait kasus Rohingnya seperti, membangun rumah sakit, sekolah, memberi bantuan makanan dan obat-obatan¹², hingga pemberian dana yang akan dialokasikan ke Myanmar melalui satuan tugas *ad-hoc* dibawah kendali Sekretariat ASEAN sebesar tujuh miliar lima ratus juta Rupiah (Rp 7,500,000,000).¹³ Indonesia mendapat dukungan dari UNHCR (*United Nations High Commissioners for Refugees*), IOM (*International Organization for Migration*), SEAHUM (*The Southeast Asian Humanitarian Committee*), hingga organisasi kemanusiaan Indonesia lainnya seperti, HRWG (*Indonesian Human Rights Watch Group*). Selain organisasi domestik maupun internasional, konflik Rohingnya juga mendapat perhatian dari yayasan bantuan pendanaan seperti, KontraS, Imparsial, dan YLBHI (*Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*).¹⁴

b. Kaitan Aktivitas Diplomasi Indonesia dengan Teori Diplomasi Konferensi

Diplomasi konferensi yang dilakukan Indonesia melalui KTT ASEAN ke-35 terkait etnis Rohingnya dapat dijelaskan melalui teori dan konsep diplomasi konferensi yang telah dipaparkan sebelumnya. Sesuai dengan definisinya, diplomasi konferensi yang merujuk pada pengelolaan hubungan antar semua aktor dalam bentuk konferensi internasional¹⁵, KTT ASEAN ke-35 menjadi wadah bagi negara-negara dalam sistem internasional terutama negara anggota ASEAN untuk mendiskusikan resolusi konflik terbaik bagi kasus diskriminasi etnis Rohingnya. Konferensi internasional ini juga berfungsi sebagai arena pengelolaan hubungan antar semua aktor terkait dalam isu tersebut agar keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan kolektif dari setiap partisipan.

Diplomasi konferensi Indonesia dalam KTT ASEAN ke-35 terkait etnis Rohingnya juga dapat dijelaskan melalui indikator-indikator diplomasi konferensi yang dikemukakan oleh A.J.R Groom. Beberapa diantara yaitu, *diplomasi konferensi sebagai sarana negosiasi dan diskusi terkait isu global serta menuntut penyelesaian secara multilateral*. Indikator tersebut terpenuhi melalui fakta bahwa KTT ASEAN ke-35 terkait krisis etnis Rohingnya menitikberatkan pada isu HAM serta mobilisasi etnis minoritas tersebut. Isu HAM menjadi sangat krusial mengingat adanya kerangka R2P yang ingin diwujudkan Indonesia bersama dengan negara-negara lainnya. Di samping itu, diplomasi konferensi ini juga menjadi arena negosiasi dan diskusi bagi seluruh aktor terkait demi mencapai resolusi konflik Rohingnya baik dalam upaya repatriasi, pembentukan gugus tugas *ad hoc*, hingga penyaluran dana bantuan kemanusiaan.

Indikator selanjutnya adalah sebagai *bentuk legitimasi yang dimiliki oleh organisasi regional (ASEAN) dalam menggerakkan negara-negara anggotanya untuk berdiplomasi pada forum terbuka*.

¹¹ "ASEAN Akan Bentuk Gugus Tugas Ad Hoc Kawal Repatriasi Rohingnya," *loc.cit*.

¹² "Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar 'Hentikan Dan Cegah Kekerasan'," BBC News Indonesia (BBC), *loc.cit*.

¹³ "Indonesia Berikan Bantuan Hibah Untuk Pemulangan Pengungsi Rakhine State: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia." Indonesia Berikan Bantuan Hibah Untuk Pemulangan Pengungsi Rakhine State | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, diakses 22 Mei, 2021, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/915/view/indonesia-berikan-bantuan-hibah-untuk-pemulangan-pengungsi-rakhine-state>

¹⁴ Claire Q. Smith, and Susannah G. Williams. Why Indonesia Adopted 'Quiet Diplomacy' over R2P in the Rohingnya Crisis: The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil-Military Relations, and ASEAN. *Global Responsibility to Protect 13*, 7-8. 2021. doi: <https://doi.org/10.1163/1875-984X-13020004>

¹⁵ Johan Kaufmann. *Conference Diplomacy: An Introductory Analysis*: edisi ketiga (pp.7-16). London: MACMILLAN PRESS LTD. 1996

Dalam *ASEAN Charter, Chapter IV Article 7 (2)* bagian (a) dijelaskan bahwa KTT ASEAN merupakan badan pembuat keputusan tertinggi dalam struktur organisasi ASEAN. Selanjutnya pada bagian (c) disebutkan bahwa ASEAN dapat menginstruksikan masing-masing badannya untuk mengadakan pertemuan internal *ad hoc* dan membahas isu-isu penting dalam organisasi maupun anggota ASEAN sekaligus menegaskan bahwa semua aturan dan prosedur untuk pertemuan-pertemuan tersebut wajib diadopsi oleh *ASEAN Coordinating Council*, atau singkatnya wajib dilaksanakan.¹⁶ Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa diplomasi konferensi dalam bentuk KTT ASEAN ke-35 yang salah satu topik bahasannya mengangkat permasalahan etnis Rohingya ini merupakan perwujudan legitimasi dari ASEAN sebagai aktor regional yang wajib dilaksanakan dan dihadiri oleh negara-negara anggotanya.

Indikator ketiga dari diplomasi konferensi adalah *pembahasan, diskusi, atau negosiasi secara terbuka yang meliputi negara, melainkan juga IGOs, NGOs, kelompok masyarakat sipil, bahkan individu*. KTT ASEAN ke-35 terkait isu etnis Rohingya tidak hanya dihadiri perwakilan negara-negara anggota ASEAN, melainkan mendapat perhatian penuh dari utusan-utusan serta Sekjen PBB. Utusan serta Sekjen PBB turut hadir dalam diplomasi konferensi tersebut guna menyatakan bahwa 740 ribu pengungsi Rohingya membutuhkan perhatian dan tindakan lebih lanjut baik dari pihak domestik, regional, maupun internasional.¹⁷

Dengan adanya diplomasi konferensi tersebut, keputusan-keputusan Indonesia, negara anggota ASEAN lainnya, para NGO pendukung, serta PBB dibuka secara transparan kepada publik. Dimana, keputusan tersebut berkaitan dengan indikator selanjutnya yakni, *hasil dari diplomasi konferensi biasanya diadopsi menjadi perjanjian internasional atau menjadi rekomendasi bagi kebijakan domestik suatu negara*. Isu Rohingya yang telah dibahas sejak tahun 2016 ini menuntun pada dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.¹⁸ Inilah yang digunakan sebagai instrumen legalitas oleh pemerintah Indonesia dalam menyalurkan bantuannya bagi etnis Rohingya, termasuk setelah KTT ASEAN 35 seperti, pengalokasian dana melalui satuan gugus tugas *ad-hoc* dibawah kendali Sekretariat ASEAN sebesar tujuh miliar lima ratus juta Rupiah (Rp 7,500,000,000).¹⁹ Keberadaan Peraturan Presiden ini dengan demikian merepresentasikan indikator *output* diplomasi konferensi yang dapat diadopsi menjadi kebijakan domestik resmi suatu negara.

c. Analisis SWOT

Berkaitan dengan diplomasi konferensi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait konflik etnis Rohingya di Myanmar, penulis merumuskan analisis *strength, weakness, opportunity, and threat* yang harus dihadapi Indonesia. Penjelasan terkait analisis SWOT tersebut akan dijelaskan secara lebih terperinci melalui beberapa bagian analisa di bawah ini:

¹⁶ ASEAN Charter, "CHARTER of the ASSOCIATION of SOUTHEAST ASIAN NATIONS PREAMBLE," diakses 10 Juni, 2021, <https://www.asean.org/storage/images/archive/21069.pdf>

¹⁷ Lisbet. Isu Strategis dalam KTT ke-35 ASEAN dan Posisi Indonesia. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis 11*, No. 21, 9. 2019. doi: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-21-I-P3DI-Desember-2019-238.pdf

¹⁸ Krithika Varagur, "Indonesia Atasi Masalah Pengungsi Dengan Peraturan Presiden," VOA Indonesia (Indonesia Atasi Masalah Pengungsi dengan Peraturan Presiden, 4 Februari, 2017), <https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html>.

¹⁹ "Indonesia Berikan Bantuan Hibah Untuk Pemulangan Pengungsi Rakhine State: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *loc.cit*.

Strength

Terdapat beberapa hal terkait politik dalam negeri Indonesia yang menjadi kekuatan (*strength*) bagi kesuksesan aktivitas diplomasi konferensi Indonesia terkait konflik etnis Rohingnya di Myanmar. Penyebab **pertama** yang membantu suksesnya diplomasi Indonesia dalam meredakan konflik tersebut adalah, pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan yang tinggi dari masyarakat domestik untuk berperan aktif menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingnya yang terjadi di Myanmar.²⁰ Atas dasar dukungan tersebut, Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Menteri Luar Negeri Indonesia yaitu, Retno Marsudi, agar meminta pemerintahan Myanmar untuk memberikan akses bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingnya yang melakukan pengungsian. Mandat Presiden Joko Widodo tersebut menunjukkan bahwa dukungan positif dari masyarakat Indonesia menjadi kekuatan domestik tersendiri untuk semakin membulatkan tekad negara dalam mengartikulasikan tujuan partisipasinya terkait penyelesaian konflik etnis Rohingnya.

Faktor kekuatan internal **kedua** adalah adanya kesamaan agama yang dianut oleh masyarakat etnis Rohingnya dan mayoritas penduduk Indonesia, yaitu agama Muslim. Hal ini menimbulkan adanya rasa solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Myanmar. Sehingga, pemerintah Indonesia semakin tegas dalam melancarkan aktivitas diplomasinya demi membantu meredakan krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Fakta bahwa masyarakat Muslim Rohingnya merupakan minoritas di Myanmar mengakibatkan kelompok ini harus berhadapan dengan berbagai ancaman diskriminasi sosial serta pelanggaran hak-hak dasar kemanusiaan. Rasa solidaritas yang dimiliki Indonesia pun mendorong terwujudnya bantuan-bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingnya. Selain itu, Indonesia juga memberikan usul kepada pemerintahan Myanmar agar mengundang PBB serta negara lainnya yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam rangka mencapai resolusi konflik, demi terwujudnya opini yang seimbang dalam penyelesaian konflik Rohingnya.²¹

Dorongan internal **ketiga** yang menjadi kekuatan bagi Indonesia adalah legalitas identitasnya dalam sistem internasional. Dimana, identitas yang dimiliki Indonesia ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia, yang berbunyi, “... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”²² Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia secara aktif akan turut serta memberikan kontribusi dalam menjaga perdamaian dunia, atau dalam kasus ini, perdamaian regional. Selain itu, kestabilan regional juga merupakan salah satu faktor penting terwujudnya pembangunan nasional Indonesia, yang menjadi faktor pendukung lain kesediaan Indonesia untuk mengambil langkah serius dalam membantu menangani konflik Rohingnya. Seluruh negara anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk terus menjaga situasi aman di kawasan Asia Tenggara. Dimana, situasi aman berarti menciptakan kawasan yang bebas dari konflik antar negara anggota ASEAN serta ancaman terorisme. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN, Indonesia berupaya menjaga perdamaian regional dengan menghindari konflik yang berpotensi memicu instabilitas kawasan, termasuk eskalasi konflik Rohingnya yang berpeluang mengancam keamanan regional.

²⁰ “Presiden Jokowi Meminta Pemerintah Myanmar 'Hentikan Dan Cegah Kekerasan,’” BBC News Indonesia (BBC), *loc.cit.*

²¹ “Peran Indonesia Dalam Konflik Horizontal Etnis Rohingnya (Perspektif Filsafat Pancasila),” Universitas Gadjah Mada, 16 Oktober, 2017, <https://pancasila.filsafat.ugm.ac.id/2017/10/16/peran-indonesia-dalam-konflik-horizontal-etnis-rohingya-perspektif-filsafat-pancasila/>.

²² Setjen DPR RI, “Situs Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - DPR RI,” Dewan Perwakilan Rakyat, diakses 30 Juni, 2021, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Berdasarkan dorongan tersebut, Retno Marsudi menemui beberapa pejabat Myanmar dan memberikan usulan “4 plus 1” sebagai upaya tindak lanjut diplomasi Indonesia terhadap tindakan diskriminasi di negara bagian Rakhine, yang dihuni oleh penduduk Muslim-Rohingya.²³ Keempat usul yang diberikan tersebut meliputi *mengembalikan kestabilan keamanan, menahan diri agar tidak menggunakan kekerasan semaksimal mungkin, menyediakan perlindungan yang setara bagi seluruh warga di Rakhine tanpa memandang latar belakang suku dan agama, serta membuka akses bantuan kemanusiaan*. Usulan tersebut diterima oleh pemerintah Myanmar yang kemudian direkomendasikan oleh Komisi Penasehat Rakhine agar hambatan utamanya yakni isu kewarganegaraan segera diatasi demi tercapainya perdamaian di negara bagian Rakhine. Secara lebih lanjut, ia juga memaparkan bahwa isu kewarganegaraan yang tidak segera diberikan penanganan akan menjadi penyebab signifikan penderitaan kemanusiaan dan kelaparan, serta mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial di seluruh Myanmar.²⁴ Sehingga, dapat ditegaskan kembali bahwa secara internal Indonesia memiliki identitas dan tekad yang kuat untuk berpartisipasi dalam perdamaian dunia. Dimana hal ini pada akhirnya mendorong perwakilan negara seperti Menteri Luar Negeri Indonesia bersedia bergerak demi pencapaian resolusi konflik Myanmar dari akarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki tiga kekuatan internal untuk mendukung kontribusinya merumuskan resolusi konflik etnis minoritas Rohingnya melalui diplomasi konferensi KTT ASEAN ke-35, yakni, dukungan masyarakat domestik, persamaan mayoritas pemeluk agama Muslim Indonesia dan Rohingnya, serta legalitas identitas Indonesia dalam sistem internasional untuk menciptakan perdamaian dunia berdasarkan pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia.

Weakness

Diplomasi konferensi yang dilakukan Indonesia terkait permasalahan pengungsi Rohingnya, meskipun memiliki keunggulan sebagai sarana Indonesia dalam mencapai kepentingannya dalam isu Rohingnya, di sisi lain memiliki beberapa kelemahan (*weakness*). **Petama**, Indonesia bersikap terbuka dan terus menyediakan bantuan bagi para pengungsi Rohingnya yang datang ke wilayah Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan isu pengungsi Rohingnya, dimana para pengungsi tersebut terus melewati batas wilayah Indonesia dan mencari perlindungan di wilayah Indonesia. Namun dengan sikap Indonesia yang tidak pernah menolak pengungsi Rohingnya tersebut mengakibatkan Indonesia terkesan tidak bersikap tegas dalam menegakkan tujuannya terkait repatriasi etnis Rohingnya.

Sama halnya dengan Malaysia dan Thailand, sikap pertama pemerintah Indonesia dalam menyikapi para pengungsi Rohingnya yang memasuki wilayahnya adalah menolak para pengungsi dan hanya menyalurkan bantuan makanan kepada perahu-perahu yang ditumpangi pengungsi Rohingnya di wilayah perairan Indonesia. Namun seiring dengan semakin bertambahnya jumlah perahu pengungsi Rohingnya yang datang ke perairan Indonesia terutama perairan Aceh, masyarakat yang tinggal di sepanjang garis pantai merasa iba dan menerima para pengungsi tersebut, sekalipun telah diperingatkan sebelumnya oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lokasi.²⁵ Selain

²³ Eva Mazrieva, “Bantu Atasi Krisis Rohingnya, Menlu RI Sampaikan Usul ‘4+1’,” VOA Indonesia (Bantu Atasi Krisis Rohingnya, Menlu RI Sampaikan Usul ‘4+1’, 4 September, 2017), <https://www.voaindonesia.com/a/bantu-atasi-krisis-rohingya-menlu-ri-sampaikan-usul-4-1/4014956.html>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Deasy Silvy Sari. Indonesian Government Policy on Rohingnya Refugees. *Andalas Journal of International Studies* 7, No. 1, 2. 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>

masyarakat setempat yang terus terbuka, komunitas lokal seperti *Amnesty International*, *Human Rights Working Group* (HRWG), dan SUAKA terus mendorong pemerintah Indonesia untuk tetap terbuka dan memberikan perlindungan bagi para pengungsi Rohingnya yang singgah di wilayah Indonesia atas dasar nilai kemanusiaan dan solidaritas.²⁶ Ketidakselarasan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan untuk bersikap tegas terhadap pengungsi Rohingnya dan terus menyediakan perlindungan bagi pengungsi Rohingnya yang memasuki batas wilayah Indonesia. Hal ini juga menyebabkan semakin banyaknya pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia untuk mencari perlindungan, dengan menganggap perlindungan akan selalu diberikan oleh Indonesia.

Kedua, dana terbatas yang dimiliki pemerintah Indonesia untuk pembangunan dalam negeri, mengakibatkan pemerintah Indonesia harus menyisihkan dana untuk memberikan bantuan kepada para pengungsi Rohingnya di Indonesia. Dana tersebut dialokasikan pemerintah, terutama untuk pembangunan tempat penampungan bagi pengungsi Rohingnya, dari total dana penanggulangan bencana alam.²⁷ Kondisi pandemi Covid-19 juga membuat pemerintah harus mengalokasikan dana tambahan untuk memastikan protokol kesehatan diterapkan pada lokasi penampungan para pengungsi Rohingnya. Selain itu, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung repatriasi pengungsi Rohingnya, pemerintah berencana memberikan dana hibah kepada pemerintah Myanmar sebesar 7.500.000.000 miliar Rupiah,²⁸ yang meskipun nominal tersebut tidak berdampak besar bagi Myanmar, dana tersebut akan semakin meningkatkan pengeluaran pemerintah Indonesia.

Ketiga, sebagai negara anggota ASEAN yang mengutamakan prinsip non-intervensi, tindakan Indonesia dan komitmen pemerintah Indonesia dalam isu Rohingnya terkesan mengintervensi permasalahan internal Myanmar. Prinsip non-intervensi merupakan prinsip utama yang dijunjung negara-negara anggota ASEAN, sehingga setiap negara tidak dapat saling mengintervensi atau turut campur dalam urusan internal negara lain. Meskipun demikian, komitmen Indonesia untuk mendukung repatriasi pengungsi Rohingnya kembali ke Myanmar, yang didorong oleh nilai kemanusiaan dan solidaritas, merupakan tindakan yang berlawanan dengan prinsip tersebut. Dimana, meskipun Indonesia telah terus berusaha meningkatkan kontribusi ASEAN dalam isu tersebut, mayoritas negara anggota ASEAN tetap hanya memberikan tanggapan yang diplomatis terkait isu tersebut.²⁹ Melalui hal ini, dapat dilihat bahwa sikap intervensi Indonesia yang berlawanan dengan prinsip ASEAN, menyebabkan Indonesia sulit memperoleh dukungan dari negara-negara Asia Tenggara lain, khususnya anggota ASEAN, dan menyebabkan kurang efisiennya diplomasi yang dilakukan Indonesia tersebut.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam diplomasi konferensinya terkait permasalahan Rohingnya, Indonesia memiliki tiga kelemahan internal yakni, ketidakmampuan Indonesia untuk menolak pengungsi Rohingnya sehingga para pengungsi terus berdatangan dan Indonesia menjadi terkesan tidak tegas dalam mewujudkan upaya repatriasi etnis tersebut, permasalahan alokasi dana

²⁶ The Jakarta Post, "Indonesia Draws Praise for Assisting Rohingnya as ASEAN Fails to Mitigate Crisis," The Jakarta Post, diakses 26 Juni, 2021, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/29/indonesia-draws-praise-for-assisting-rohingya-asean-fails-to-mitigate-crisis.html>.

²⁷ Deasy Silvyia Sari. Indonesian Government Policy on Rohingnya Refugees. *Andalas Journal of International Studies* 7, No. 1, 8. 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>

²⁸ "Indonesia Berikan Bantuan Hibah Untuk Pemulangan Pengungsi Rakhine State: Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia," Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *loc.cit.*

²⁹ Asia News Monitor, "Indonesia: Greater Role of ASEAN Expected in Addressing Rohingnya Ethnic Cleansing," (Bangkok: Proquest document link, 2018), 2, diakses 26 Juni, 2021, <https://www.proquest.com/newspapers/indonesia-greater-role-asean-expected-addressing/docview/2134935823/se-2?accountid=31495>.

bagi etnis Rohingya berpotensi memicu instabilitas ekonomi domestik, serta tekad Indonesia untuk terus berpartisipasi serta terlibat dalam permasalahan negara lain bertentangan dengan asas non-intervensi ASEAN, sehingga dalam kasus ini Indonesia tidak mendapatkan dukungan secara menyeluruh dari semua anggota ASEAN.

Opportunity

Terkait diplomasi konferensi Indonesia dalam KTT ASEAN ke-35 terkait etnis Rohingya, terdapat beberapa peluang eksternal yang berpotensi menyukseskan agenda diplomasi Indonesia. **Pertama**, Indonesia mendapat dukungan dari UNHCR (*United Nations High Commissioners for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*). Bersama dengan UNHCR dan IOM, Indonesia bekerjasama untuk memastikan kesejahteraan pengungsi yang diselamatkan. Di samping itu, kerjasama ini juga diharapkan mampu menghasilkan upaya lebih lanjut untuk menangani konflik diskriminasi etnis minoritas Rohingya.³⁰

Kedua, selain UNHCR dan IOM, pihak eksternal yang turut mendukung upaya Indonesia mencapai resolusi konflik etnis Rohingya adalah SEAHUM (*The Southeast Asian Humanitarian Committee*). Pada tahun 2019, SEAHUM mendukung tim UN FFMM (*United Nations Fact-Finding Mission on Myanmar*) untuk menyelidiki kejahatan hak asasi manusia di Myanmar. Selain membantu proses penyelidikan kejahatan kemanusiaan di Myanmar, SEAHUM juga berperan dalam mengorganisir bantuan kepada masyarakat Rohingya yang terdampak dari konflik ini. SEAHUM menegaskan bahwa Indonesia berhak memberikan bantuan selama bantuan tersebut tidak mengancam hubungan diplomatik dengan Myanmar atau mengganggu kebijakan dalam negeri Myanmar.³¹

Ketiga, gugus tugas *ad hoc* ASEAN merekomendasikan pendirian stasiun radio FM di Rakhine dengan tujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat serta membangun kesadaran akan program repatriasi etnis Rohingya. Di samping itu, gugus tugas *ad hoc* ASEAN juga turut mendukung upaya pemberian kebutuhan dasar para pengungsi seperti, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta jaminan dilaksanakannya protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penularan di kalangan pengungsi. Keikutsertaan Indonesia ini memperoleh pujian dan dukungan dari *Indonesian HRWG (Indonesian Human Rights Watch Group)*, dan *Amnesty International*.³²

Keempat, selain mendapatkan dukungan dari organisasi-organisasi internasional, diplomasi konferensi Indonesia dalam KTT ASEAN ke-35 juga mendapatkan dukungan dari yayasan bantuan pendanaan seperti, KontraS, Imparsial, dan YLBHI (*Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*).³³ Dukungan yayasan bantuan pendanaan ini menyatakan dukungannya untuk turut serta memberi bantuan dana kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya. Selain itu, LSM domestik ini juga berupaya untuk membentuk jaringan masyarakat guna mengartikulasikan kepada pemerintah Indonesia bahwa kontribusinya terkait isu Rohingya merupakan langkah yang tepat. Sehingga, LSM dalam konteks ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk terus melancarkan tujuan diplomasi

³⁰ The Jakarta Post, "Indonesia Draws Praise for Assisting Rohingya as ASEAN Fails to Mitigate Crisis." The Jakarta Post, *loc.cit.*

³¹ Claire Q. Smith, and Susannah G. Williams, "Why Indonesia Adopted 'Quiet Diplomacy' over R2P in the Rohingya Crisis: The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil-Military Relations, and ASEAN," *Global Responsibility to Protect* (2021): 165, <https://doi.org/10.1163/1875-984X-13020004>

³² *Ibid*, hlm. 164-165.

³³ *Ibid*.

konferensinya. Upaya yang dilakukan LSM ini bekerja sama dengan SEAHUM sebagai aktor eksternal Indonesia.³⁴

Kelima, dukungan dari Thailand sebagai salah satu negara anggota ASEAN. Di bawah arahan TNI, Indonesia memutuskan untuk membantu pengungsi Rohingnya dan mengizinkan para pengungsi tersebut untuk berada dalam teritori Indonesia. Bantuan berupa makanan dan tempat tinggal sementara pun menjadi sorotan akan kemurahan hati Indonesia. Hal yang dilakukan oleh Indonesia ini juga dilakukan oleh pemerintahan Thailand. Dimana, pemerintah Thailand memberikan bantuan bagi pengungsi Rohingnya yang singgah di wilayahnya terutama bantuan makanan. Selain itu, Thailand juga merupakan negara anggota ASEAN yang turut mendukung tindakan Indonesia dalam upaya memberikan bantuan kemanusiaan bagi etnis Rohingnya.³⁵

Sehingga, dapat ditegaskan kembali bahwa upaya diplomasi konferensi Indonesia dalam KTT ASEAN ke-35 terkait etnis Rohingnya memiliki lima peluang keberhasilan. Kelima peluang tersebut adalah, dukungan Thailand, dukungan UNHCR dan IOM, dukungan SEAHUM yang turut mendukung UN FFMM dalam menyelidiki kasus kemanusiaan di Myanmar, kerjasama gugus tugas *ad hoc* ASEAN yang memperoleh dukungan dari *Indonesian HRWG* serta *Amnesty International*, hingga dukungan LSM domestik seperti KontraS, Imparsial, dan YLBHI yang bekerjasama dengan SEAHUM.

Threat

Diplomasi konferensi Indonesia dalam KTT ASEAN ke-35 terkait resolusi konflik Rohingnya memiliki beberapa ancaman eksternal, baik yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung. **Pertama**, penolakan bantuan kemanusiaan oleh pihak Myanmar terkait konflik Rohingnya. Bantuan ini diajukan dalam sebuah pertemuan sekretariat ASEAN berdasarkan banyaknya korban atau pengungsi Rohingnya yang tersebar di berbagai bagian kawasan Asia Tenggara. Menurut situs *Human Rights Watch*, sejak Januari hingga Maret tahun 2020, sudah banyak kapal kecil yang tiba di pesisir negara-negara kawasan Asia Tenggara. Kondisi pengungsi Rohingnya yang tiba dengan kapal tersebut pun bermacam-macam, mulai dari kondisi yang mengancam nyawa dikarenakan kurangnya asupan makanan dan minuman, serta luka-luka ringan lainnya.³⁶

Pada awal tahun 2020, pemerintah Malaysia menyatakan terdapat 269 pengungsi yang terdampar di Pelabuhan Langkawi. Ditambah lagi dengan 94 pengungsi yang terdampar di pesisir Aceh bagian timur, dimana 30 diantaranya terhitung masih anak-anak.³⁷ Melihat peristiwa yang terjadi, berbagai negara di Asia Tenggara berusaha untuk menyalurkan bantuan melalui konferensi ASEAN, tetapi respon dari pemerintah Myanmar terbilang cukup acuh bahkan menolak bantuan kemanusiaan dari negara-negara tetangganya. Hal ini terbukti pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-53, saat Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengekspresikan kekhawatirannya terkait krisis Rohingnya yang sedang terjadi, dan tanggapan dari pemerintah

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Deasy Sari, "(PDF) *INDONESIAN GOVERNMENT POLICY ON ROHINGYA REFUGEES*," ResearchGate. Perpustakaan Universitas Andalas, 22 Juni, 2018: 9-10. https://www.researchgate.net/publication/327413064_INDONESIAN_GOVERNMENT_POLICY_ON_ROHINGYA_REFUGEES.

³⁶ "ASEAN: Overhaul Regional Response to Rohingnya Crisis," Human Rights Watch, 28 Oktober, 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/06/26/asean-overhaul-regional-response-rohingya-crisis>.

³⁷ *Ibid.*

Myanmar justru tidak baik.³⁸ Pemerintah Myanmar menjelaskan bahwa krisis Rohingnya ini merupakan aksi memberantas teroris lokal dan sikap ikut campur negara lain hanya akan memperburuk situasi Covid-19 di Myanmar.³⁹

Kedua, sikap tertutup Myanmar terhadap dunia internasional, termasuk PBB. Seperti ancaman pertama yang telah dijelaskan sebelumnya, pemerintah Myanmar tidak hanya menolak bantuan kemanusiaan dari ASEAN, tetapi juga menutup diri dari dunia internasional, termasuk PBB. Tercatat pada tahun 2019, pemerintah Myanmar secara terus menerus mengabaikan panggilan atau bantuan internasional untuk menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap sekelompok etnis minoritas yang menetap di negara bagian Shan, Kachin, Karen, dan Rakhine.⁴⁰ Kelompok Misi Pencari-Fakta yang dikerahkan oleh PBB (FFM) menemukan sejumlah bukti untuk melaksanakan investigasi terkait tindakan kriminal atas pelanggaran hak asasi manusia dan genosida terhadap etnis muslim Rohingnya. Pemimpin de facto Aung San Suu Kyi beserta para stafnya telah menolak untuk bekerjasama dengan PBB dalam rangka menangani investigasi terkait pelanggaran hak asasi manusia ini. Hal tersebut didukung dengan pemerintah Myanmar yang enggan mengatasi penyebab akar krisis, termasuk penganiayaan dan kekerasan sistematis, serta impunitas militer yang berkelanjutan.⁴¹ Pemerintah Myanmar juga tidak memberikan akses visa kepada badan penyelidik PBB, termasuk pelapor khusus Yanghee Lee dan juga anggota PBB FFM, serta akses terbatas ke negara tersebut oleh staf Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk hak asasi manusia.⁴²

Ketiga, pernyataan Aung San Suu Kyi sebagai pimpinan Myanmar yang menegaskan bahwa permasalahan yang terjadi ini terlalu dibesar-besarkan oleh pengungsi Rohingnya sendiri. Kantor berita bernama *Reuters* memaparkan bahwa Aung San Suu Kyi menjelaskan pernyataan pengungsi hanya akan memperburuk keadaan dengan membesar-besarkan perlakuan buruk dari pemerintah terhadap etnis Rohingnya. Dalam sebuah opini yang diterbitkan di *Financial Times* menjelang putusan Pengadilan Internasional (ICJ) awal tentang masalah ini, Aung San Suu Kyi mengatakan bahwa Myanmar adalah korban dari “*narasi yang tidak berdasar*” oleh kelompok hak asasi manusia dan penyelidik PBB.⁴³ Beliau juga mengatakan bahwa negara ini dapat menangani masalah krisis Rohingnya melalui mekanisme domestik. ICJ pun mengatakan telah memiliki yurisdiksi untuk menangani konflik tersebut, yang mana yurisdiksi ini adalah untuk mencari tindakan darurat terkait pencegahan pemerintah Myanmar melakukan genosida terhadap etnis minoritas Rohingnya.⁴⁴

Keempat, meskipun penyelidik PBB dan pihak ICJ menegaskan bahwa kasus Rohingnya merupakan tindakan genosida, pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi disisi lain menjelaskan bahwa konflik ini adalah upaya pemerintah dalam menangani kasus terorisme. Berkaitan dengan ancaman ketiga, menurut Aung San Suu Kyi, pihak eksternal Myanmar melihat kasus ini sebagai tindakan genosida karena pernyataan dari pengungsi Rohingnya yang terlalu dibesar-besarkan. Pemerintah Myanmar juga menjelaskan sekitar 6.500 Muslim Rohingnya yang berasal dari negara bagian Rakhine

³⁸ The Jakarta Post, “Indonesia Appeals for End to Rohingnya Crisis,” The Jakarta Post, diakses 29 Juni, 2021, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/09/11/indonesia-appeals-for-end-to-rohingya-crisis.html>.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ “World Report 2020: Rights Trends in Myanmar,” Human Rights Watch, 16 Juni, 2020, <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/myanmar-burma#>.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ “Myanmar Leader Suu Kyi Says Rohingnya 'Exaggerated' Abuses - FT,” Reuters (Thomson Reuters, 23 Juni, 2020), <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-idUSKBN1ZM154>.

⁴⁴ *Ibid.*

yang mana namanya muncul pada tempat pengungsian di Bangladesh untuk dipulangkan telah “terlibat dalam aksi terorisme.”⁴⁵ Pernyataan tersebut dilontarkan tanpa adanya spesifikasi waktu atau lokasi dari aktivitas yang jelas.

Sehingga, secara eksternal terdapat empat ancaman yang berpotensi menghambat perwujudan tujuan Indonesia dalam diplomasi konferensi di KTT ASEAN ke-35 terkait etnis Rohingnya. Keempat ancaman tersebut adalah, penolakan bantuan kemanusiaan oleh Myanmar, sikap tertutup Myanmar terhadap pemerintah internasional termasuk PBB, pernyataan Aung San Suu Kyi yang menegaskan bahwa masalah ini dibesar-besarkan oleh para pengungsi, hingga pernyataan Aung San Suu Kyi yang mengatakan bahwa kasus Rohingnya adalah upaya pemberantasan terorisme bukan genosida.

Kesimpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa diplomasi konferensi Indonesia terkait konflik etnis Rohingnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo belum sepenuhnya berhasil. Hal ini dikarenakan meskipun beberapa bantuan kemanusiaan seperti, pembangunan sekolah dan rumah sakit telah terlaksana, pihak Myanmar belum seutuhnya menerima bantuan Indonesia dan negara lain. Di samping itu, pemerintah Myanmar masih bersikeras menegaskan bahwa tindakan terhadap etnis Rohingnya bukanlah genosida dan pelanggaran kemanusiaan, sehingga pihak eksternal tidak perlu ikut campur.

Di samping itu, meskipun memiliki kekuatan faktor-faktor domestik seperti, dukungan rakyat, kesamaan identitas Muslim, dan legalitas identitas Indonesia dalam sistem internasional untuk menciptakan perdamaian dunia, Indonesia harus menerima kenyataan bahwa sikap Indonesia yang selalu menerima pengungsi membuatnya terkesan tidak tegas dalam upaya repatriasi etnis Rohingnya, disertai kondisi perekonomian domestik masih jauh dari stabil sehingga bantuan kemanusiaan dan dana yang dikeluarkannya berpotensi menimbulkan masalah baru di dalam negeri, dan asas non-intervensi ASEAN membuat identitas Indonesia yang selalu ingin terlibat tidak berhasil mendapatkan dukungan penuh dari negara-negara anggota ASEAN.

Peluang keberhasilan diplomasi konferensi Indonesia yang didukung oleh berbagai pihak seperti, Thailand, UNHCR, IOM, *Indonesian HRWG*, *Amnesty International*, kerjasama SEAHUM dengan KontraS, Imparsial, serta YLBHI juga harus menghadapi ancaman yaitu, penolakan dari pihak Myanmar, sikap tertutup Myanmar pada dunia internasional, pernyataan Aung San Suu Kyi bahwa pengungsi hanya membesar-besarkan masalah, hingga klaim Aung San Suu Kyi bahwa apa yang terjadi di Myanmar adalah upaya pemberantasan terorisme bukan genosida. Hal ini mengakibatkan kekuatan domestik internal dan peluang keberhasilan dari faktor eksternal belum mumpuni untuk menghadapi kelemahan dan ancaman dari diplomasi konferensi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo terkait isu kemanusiaan etnis Rohingnya di Myanmar.

⁴⁵ United Nations High Commissioner for Refugees, “Dozens of ‘Terrorists’ among Rohingnya Slated for Repatriation, Myanmar Official Says,” Refworld, diakses 29 Juni, 2021, <https://www.refworld.org/docid/5c2cc3a913.html>.

Referensi

- ASEAN. (n.d.). *CHARTER of the ASSOCIATION of SOUTHEAST ASIAN NATIONS PREAMBLE*. ASEAN Charter. <https://www.asean.org/storage/images/archive/21069.pdf>
- ASEAN: *Overhaul Regional Response to Rohingya Crisis*. (2020, October 28). Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2020/06/26/asean-overhaul-regional-response-rohingya-crisis>. [Diakses pada 29 Juni, 2021].
- Bartson, R.P. (1997). *Modern Diplomacy*. New York: Longman.
- Groom, A.J.R. (2013). Conference Diplomacy. In A. F. Cooper, J. Heine, & R. Thakur (Eds.), *The Oxford Handbook of Modern Diplomacy*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Indonesia Berikan Bantuan Hibah Untuk Pemulangan Pengungsi Rakhine State*. (2019, December 20). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/915/view/indonesia-berikan-bantuan-hibah-untuk-pemulangan-pengungsi-rakhine-state>. [Diakses pada 22 Mei, 2021].
- Indonesia: Greater Role of ASEAN Expected in Addressing Rohingya Ethnic Cleansing*. (2018, November 19). ProQuest. <https://www.proquest.com/newspapers/indonesia-greater-role-asean-expected-addressing/docview/2134935823/se-2?accountid=31495>. [Diakses pada 26 Juni, 2021].
- Kaufmann, J. (1996). *Conference Diplomacy: An Introductory Analysis* (Third ed.). London: MACMILLAN PRESS LTD.
- Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Bangkok, Merangkap UNESCAP Kerajaan Thailand*. (2019, November 1). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/bangkok/id/news/2944/presiden-joko-widodo-hadiri-ktt-asean-ke-35-di-bangkok>. [Diakses pada 22 Mei, 2021].
- KTT ASEAN Gagal Menjawab Krisis Rohingnya: Pemerintah Indonesia Harus Menjadi Pionir Dalam Mendorong Akuntabilitas HAM dalam Krisis Rohingnya*. (2017, November 27). KontraS. <https://kontras.org/2017/11/27/ktt-asean-gagal-menjawab-krisis-rohingya-pemerintah-indonesia-harus-menjadi-pionir-dalam-mendorong-akuntabilitas-ham-dalam-krisis-rohingya/>. [Diakses pada 30 Juni, 2021].
- Lisbet. (2019). Isu Strategis dalam KTT ke-35 ASEAN dan Posisi Indonesia. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, 11(21), 7-12. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XI-21-I-P3DI-Desember-2019-238.pdf
- Mazrieva, E. (2017, September 4). *Bantu Atasi Krisis Rohingnya, Menlu RI Sampaikan Usul '4+1'*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/bantu-atasi-krisis-rohingya-menlu-ri-sampaikan-usul-4-1/4014956.html>. [Diakses pada 29 Juni, 2021].
- McPherson, P. E. (2020, January 23). *Myanmar leader Suu Kyi says Rohingnya 'exaggerated' abuses - FT*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-idUSKBN1ZM154>. [Diakses pada 29 Juni, 2021].
- Musyaffa, I. (2019, November 3). *ASEAN Akan Bentuk Gugus Tugas Ad Hoc Kawal Repatriasi Rohingnya*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/id/regional/asean-akan-bentuk-gugus-tugas-ad-hoc-kawal-repatriasi-rohingya/1634042>. [Diakses pada 22 Mei, 2021].

- Peran Indonesia Dalam Konflik Horizontal Etnis Rohingnya (Perspektif Filsafat Pancasila)*. (2017, October 16). Universitas Gadjah Mada Fakultas Filsafat Menara Ilmu Pancasila. <https://pancasila.filsafat.ugm.ac.id/2017/10/16/peran-indonesia-dalam-konflik-horizontal-etnis-rohingya-perspektif-filsafat-pancasila/>. [Diakses pada 29 Juni, 2021].
- Presiden Jokowi meminta pemerintah Myanmar 'hentikan dan cegah kekerasan'*. (2017, September 3). BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41140890>. [Diakses pada 21 Mei, 2021].
- Presiden Jokowi Sampaikan Pandangan bagi Pemulihan Situasi di Rakhine State*. (2019, November 3). Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/749/view/presiden-jokowi-sampaikan-pandangan-bagi-pemulihan-situasi-di-rakhine-state>. [Diakses pada 22 Mei, 2021].
- Refworld. (2018, November 8). *Dozens of 'terrorists' among Rohingnya slated for repatriation, Myanmar official says*. United Nations High Commissioner for Refugees. <https://www.refworld.org/docid/5c2cc3a913.html>. [Diakses pada 29 Juni, 2021].
- Sari, D. S. (2018). Indonesian Government Policy on Rohingnya Refugees. *Andalas Journal of International Studies*, 7(1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.25077/ajis.7.1.1-13.2018>
- Septiari, D. (2020, June 29). *Indonesia Draws Praise for Assisting Rohingnya as ASEAN Fails to Mitigate Crisis*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/news/2020/06/29/indonesia-draws-praise-for-assisting-rohingya-as-asean-fails-to-mitigate-crisis.html>. [Diakses pada 29 Juni, 2021].
- Septiari, D. (2020, September 11). *Indonesia Appeals for End to Rohingnya Crisis*. The Jakarta Post. <https://www.thejakartapost.com/seasia/2020/09/11/indonesia-appeals-for-end-to-rohingya-crisis.html>. [Diakses pada 29 Juni, 2021].
- Smith, C. Q., & Williams, S. G. (2021). Why Indonesia Adopted 'Quiet Diplomacy' over R2P in the Rohingnya Crisis: The Roles of Islamic Humanitarianism, Civil–Military Relations, and ASEAN. *Global Responsibility to Protect*, 13(2-3), 158-185. <https://doi.org/10.1163/1875-984X-13020004>
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. (n.d.). Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. [Diakses pada 30 Juni, 2021].
- Varagur, K. (2017, February 4). *Indonesia Atasi Masalah Pengungsi Dengan Peraturan Presiden*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/ri-atasi-pengungsi-dengan-keppres-/3696412.html>. [Diakses pada 10 Juni, 2021].
- World Report 2020: Rights Trends in Myanmar*. (2020, January 16). Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/myanmar-burma#>. [Diakses pada 29 Juni, 2021].